



Lahan Trans Harus 'Clear and Clean'

YOGYA (KR) - Sekarang ini banyak lokasi penempatan transmigran yang tidak siap dan kemudian menjadi masalah. Karena itu lahan trans mendatang harus *clear and clean*, layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan. Jika belum jelas, jangan berangkatkan transmigran.

Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigran (P2KT) Kemenakertrans Ir Jamaluddin Malik, mengemukakan hal tersebut pada penandatanganan naskah kerja sama antardaerah (KSAD) bidang ketransmigrasian Provinsi DIY di Gadri Ambarukmo, Kamis (8/12) malam. Penandatanganan dilakukan wakil dari Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Limapuluh Koto Sumbar, Kabupaten Gunungmas Kalteng, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Konawe Utara Sultra dengan Walikota Yogya Herry Zudianto, Bupati Bantul Sri Surya Widati, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo dan Wakil Bupati Gunungkidul Iman Wahyudi. Turut menyaksikan penandatanganan, Wagub DIY Paku Alam IX.

Diakui, masalah lahan se-

karang banyak menjadi persoalan di bidang transmigrasi. Tidak sedikit lahan yang sudah digarap transmigran sebagai perkebunan yang bagus dan kemudian ada hasil, diakui pihak lain. Namun ada juga lahan transmigran yang terancam dengan pengembangan perkebunan.

"Masalah menumpuk dan masalah lahan banyak menjadi persoalan. Karena itu kami akan berkoordinasi dengan BPN dan Kemenhut," ujarnya.

Jamaluddin menyatakan, dengan regulasi baru mulai 2012 pembangunan transmigrasi harus dilaksanakan berbasis kawasan berupa wilayah pemukiman transmigran (WPT) atau lingkungan permukiman transmigran (LPT). Setiap WPT atau LPT ini terdiri dari 3-6 SKP dan di dalamnya dihuni sekitar 6 ribu -

9 ribu keluarga penduduk setempat dan transmigran.

Konsekuensi pembangunan berbasis kawasan ini menurut Dirjen P2KT Kemenakertrans maka KSAD tidak hanya merencanakan kerja sama perpindahan transmigran semata. "Harus dirancang lebih luas di bidang lain seperti kerja sama distribusi produk hasil masyarakat transmigrasi, pertu-

karan produk unggulan daerah dan lainnya," jelasnya.

Sedang Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wagub Paku Alam IX mengemukakan, program transmigrasi sudah berkembang menjadi kegiatan investasi baik *human investment* maupun *capital investment*. (Fsy) - s



KR-Fadmi Sustiwi

Walikota Yogya, Herry Zudianto dan Bupati Bantul Sri Surya Widati menandatangani kesepakatan disaksikan Wakil Kabupaten Kubu Raya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005